

RESISTENSI GENDER CALON KEPALA DAERAH

Oleh:
S u w a r d i

Abstract

Gender ideology especially in local political life is still dominant. Various cases of election in the province of Central Java in particular. This study lasted noted few major woman candidates who successfully won the election. Studi been performed in various local election in the province of Central Java, among others Sukoharjo Regency (2010); Sragen Regensi (2010); Klaten Regency (2010); Demak Regency (2010), Pati Regency (2011); Pekalongan Regency (2011); Major woman candidates have additional obstacles to win the elections, namely gender resistance.

Keyword: *local election, resistance, gender.*

Pendahuluan

Sistem politik maupun sistem pemilihan umum di Indonesia tidak membedakan antara partisipasi politik perempuan dan laki – laki. Perempuan diberikan hak politik yang sama dengan laki – laki. Kancan politik perempuan ada semenjak era perjuangan kemerdekaan, dimasa orde lama, orde baru hingga orde reformasi seperti sekarang ini. Kita masih ingat dengan tokoh Tjuk Nyak Dien hingga RA. Kartini. Masa pergerakan tidak sedikit tokoh perempuan yang menerjunkan diri memrebut dan membela kemerdekaan tanah air Indonesia. Hingga di kemerdekaan.

Tak dapat dipungkiri memang perjalanan perempuan di kancan politik mengalami pasang surut dari satu masa ke sama lainnya. Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 masa pemerintahan Presiden Soekarno menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam proses politik, yaitu dengan peran gender yang secara resmi ditetapkan oleh negara. Masa surut peran perempuan terjadi semenjak pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Gerakan-gerakan emansipatoris perempuan dipinggirkan seiring dengan kebijakan depolitisasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan di masa orde baru perannya diarahkan mendukung kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Aktivitas social politik kaum perempuan itu diwadahi dalam suatu organisasi – organisasi massa yang terbagi secara kaku agar dapat dikendalikan secara ideologis. Menurut Ira Subono (2013) hal itu berarti perempuan harus belajar menerima peran sebagai subordinat

laki-laki dan mengorbankan diri secara keseluruhan pada kepentingan keluarga. Kesenjangan dalam aspek politik secara sistematis tersebut berlaku sejalan dengan proses marjinalisasi perempuan dalam bidang pekerjaan tradisional (di sawah, pasar, dan usaha keluarga). Perempuan adalah pihak yang kalah dari suatu proses pembangunan (yang sesungguhnya berhasil) yang berjalan di bawah pemerintahan Suharto.

Memasuki era pasca orde baru hingga saat ini peranan perempuan dalam politik semakin menguat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum) menasbihkan komitmen untuk memberikan ruang yang lebih luas terhadap perempuan., yaitu dengan memberikan kuota 30% untuk perempuan di parlemen, walupun belakangan kuota tersebut dimantahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan keterpilihan anggota parlemen berdasarkan suara terbanyak.

Catatan representasi politik perempuan menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik praktis, khususnya di lembaga legislatif. Anggota DPR Sementara 1950–1955 misalnya, berhasil mengakomodasi 9kursi (3,8%) dari 236 kursi anggota legislatif terpilih saat itu. Jumlah keterwakilan perempuan hasil Pemilu 1955–1960 naik menjadi 17 kursi (6,3%) dari 272 anggota parlemen terpilih. Representasi perempuan di parlemen secara kuantitatif kembali naik turun. Di era Konstituante (1956-1959) peroleh kursi legislatif perempuan turun menjadi 25 kursi (5,1%) dari 488 kursi anggota Konstituante. Bagitu pun di era Orde Baru, keterwakilan politik perempuan di parlemen juga mengalami pasang-surut. Pemilu pertama Orde Baru

(1971–1977) berhasil menempatkan perempuan pada 36 kursi parlemen (7,8%), Pemilu 1977 29 kursi (6,3%), dan Pemilu 1982 39 kursi (8,5%) dari 460 anggota DPR terpilih pada tiga periode Pemilu tersebut. Selanjutnya, Pemilu 1987 berhasil menempatkan perempuan pada 65 kursi (13%) dari 500 kursi DPR, dan terus mengalami penurunan pada Pemilu 1992-1997, 1997–1999, dan 1999–2004 menjadi 62 kursi (12,5%), 54 kursi (10,8%), dan 46 kursi (9%) dari masing-masing 500 kursi yang berhasil di raih anggota DPR dari masing-masing periode pemilu tersebut. Berikutnya, Pemilu 2004 kembali menaikkan jumlah anggota legislatif perempuan menjadi 63 orang (11,45%) dari 550 anggota DPR terpilih, dan Pemilu 2009 berhasil menempatkan 99 anggota legislatif perempuan (17,68%) dari 560 calon anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2009.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa problem peranserta perempuan dalam politik merupakan gejala umum. Bukan hanya sector politik bidang – bidang lain masih mendiskrimasi perempuan. Goodman (1996) menjelaskan metode pelihatan fenomena ini sebagai “gender on the agenda” yaitu perspektif yang memperhatikan isu gender berdasar dari sudut pandang pembacaan teks. Ideologi gender digunakan sebagai instrument membongkar mitos-mitos dan praktek-praktek diskriminatif (yang telah diterima sebagai kebenaran universal) dalam teks kajian. Ideologi gender merupakan sebuah kerangka berpikir bermula dari perbedaan pembagian kerja bagi perempuan dan para laki – laki beresonansi terhadap relasi kekuasaan.

Menurut Butler (1999) gender dihubungkan dengan demensi – demensi seperti ras, kelas, etnisitas, seksualitas, dan lokalitas. Dengan demikian gender tidak akan terlepas dari politik dan budaya yang memproduksi dan melembagakannya. Masyarakat yang menyakini relasi antara laki – laki dan perempuan dalam lingkup masyarakat dan keluarga dengan peran ditarik secara segas maupun tersamar, selalu menempatkan perempuan dalam garis demarkasi berbeda dengan laki – laki. Apakah itu sebab fisik, sensitivitas emosional, maupun lainnya.

Scott (1986) berpendapat seiring. Konsep gender kakekatnya berhubungan dengan relasi kekuasaan itu merupakan sebuah konstruksi yang “seolah-olah” menjadi alamiah dalam konteks relasi kuasa. Dengan demikian gender menjadi sebuah ideologi. Beradaan peran – pran laki – laki perempuan selain dipahami sebagai kodrat juga memang sebaiknya begitu. Pengingkaran atas praktek social yang demikian bisa menimbulkan berbagai resistensi tidak saja diramah

pemikiran tetapi juga kekerasan social psikologis.

Bourdieu mengutip pendapat Jenkins (2004) menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dicapai melalui sebuah proses “gagal paham” (misrecognition). Sebuah proses pada saat hubungan kekuasaan tidak dipahami obyektivitasnya, tetapi dalam wujud menjadikan mereka absah di mata pemeluknya. Para perempuan alfa bahwa kejadian yang menimpa dirinya adalah kekerasan simbolis yang dimakfumkan. Diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Kondisi demikian oleh Bourdieu disebut sebagai ‘*habitus*’. Penjelasan sedewrhanyanya *habitus* merujuk pada situasi tipikal.

Haryatmoko (2003) juga merujuk pada konsep yang ditunjukkan Bourdieu tentang *hobitus*, yaitu dominasi laki-laki hakekatnya adalah kekerasan dalam konteks simbolik atau kekerasan yang tak kasat mata. Kekerasan ini oleh para korbannya yaitu perempuan bahkan tidak dilihat atau dirasakan sebagai kekerasan, tetapi sebagai sesuatu yang alamiah dan wajar. Konsepsi antropologis, sosiologis, dan teologis tentang hubungan laki-laki dan perempuan itu memiliki dampak yang mendalam.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa gender merupakan resultante konstruksi social terkait erat dengan relasi kekuasaan. Ideologi gender menjadi pondasi tatanan masyarakat di semua aspek kehidupan, norma-norma, keyakinan yang cirinya membatasi dan mengontrol dan bahkan memaksa pada mereka (perempuan) yang dianggap lebih lemah. Konstruksi atas gender adalah proses berlangsung tiada henti dalam praktek kehidupan keseharian, ritual, mitos-mitos, dan simbol.

Kekerasan polapikir gender yang demikian tersirat dalam panggung kontestasi politik local berupa pemilihan umumj kepala daerah (Pilkada). Dari berbagai penyelenggaraan Pilkada khususnya di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 – 2013 menempatkan perempuan lebih sedikit berhasil memenangi Pilkada dan duduk sebagai pucuk pimpinan kepala daerah.

Eks- Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali tidak satupun calon bupati perempuan pada periode pilkada itu sukses memenangi kontestasi. Kalolah boleh disebut hanya satu pasangan Calon Wakil Bupati Klaten, yaitu Hartini yang berpasangan dengan Calon Bupati Sunarna (Pilkada 2010) berhasil mengalahkan rival – rivalnya dan menduduki jabatan Bupati – Wakil Bupati. Selebihnya gagal Calon Bupati Sragen Yuni Untung Sukowati (Sragen); dan Calon Bupati Titik Suprapti (Sukoharjo). Di

Daerah Pantai Utara Pulau Jawa atau yang dikenal pantura, ada nama Calon Bupati (Pati); Calonj Bupati *incumbent* Siti Khomariah (Kabupaten Pekalongan) yang juga gagal menjadi kepala daerah.

Berbagai kasus pemilukada yang gagal dimenangkan oleh kandidat calon bupati perempuan tidak semata problematika kinerja personal politik, tetapi tidak lepas dari hegemoni idiologi gender. Penelitian ini berusaha mengukur persepsi public memaklumi dan menerima kepemimpinan perempuan dalam politik pemerintahan. Riset statemen adalah seberapa besar angka resistensi keterpilihan calon kepada daerah perempuan. Publikasi hasil riset ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tambahan hambatan yang harus diselesaikan oleh calon bupati perempuan yang hendak mengikuti kontestasi pilkada serentak 9 Desember 2015.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menggambarkan suatu keadaan yang menjadi focus penelitian, yaitu calon kepala daerah dengan atribut negative (gender perempuan, berusia tua, dan beragama minoritas) pada pemilihan umum kepala daerah. Penggambaran (*description*) tersebut mendasarkan pada hasil analisis angka – angka baik dalam bentuk numeric maupun prosentase dari suatu frekuensi.

Lokasi penelitian dilakukan pada pelaksanaan event Pilkada tujuh (7) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pilkada Kabupaten Sukoharjo (2010); Pilkada Kabupaten Sragen (2010); Pilkada Kabupaten Klaten (2010); Pilkada Kabupaten Demak (2010), Pilkada Kabupaten Pati (2011); Pilkada Kabupaten Pekalongan (2011); Pilkada Kota Salatiga (2011)

Populasi adalah pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih. Besarnya populasi antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya berbeda – beda. Sedangkan besarnya sampel pada penelitian ini, yaitu Pilkada Kabupaten Sukoharjo (721 responden); Pilkada Kabupaten Sragen (1.350responden); Pilkada Kabupaten Klaten (780 responden); Pilkada Kabupaten Demak (700 responden), Pilkada Kabupaten Pati (1.260); Pilkada Kabupaten Pekalongan (750 responden);

Tehnik penarikan sampel menggunakan tehnik multi stage random sampling. Pemilih dipetakan dalam wilayah kecamatan, desa atau kelurahan. Pada masing – masing desa atau kelurahan pemilih dikelompokkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pencobosan pada tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Secara umum disetiap kecamatan terdapat beberapa titik lokasi survey (TLS) bergantung pada tingkat penyebaran dan karakteristik kewilayahan yang ada di kecamatan tersebut untuk menentukan desa atau kelurahan sebagai TLS. Pengacakan dilakukan dalam dua tahap, *pertama* pengacakan untuk menentukan satu diantara sejumlah TPS yang ada di desa atau kelurahan; *kedua* pengacakan dilakukan terhadap daftar nama pemilih yang terdapat pada DPT – TPS terpilih untuk menentukan sejumlah responden. Penelitian ini menggunakan DPT sebagai kerangka sampel.

Tehnik analisis data menggunakan analisis statistic deskriptif dengan alat bantu table frekuensi dan *cross – table*. Tabulasi data dan pengorganisasian data menggunakan program SPSS.15.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan survey / penelitian ini dilakukan di beberapa kasus pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa tengah, yaitu Eks-Karesidenan Surakarta lain: Kabupaten Sukoharjo; Kabupaten Sragen; dan Kabupaten Klaten. Kawasan Pantai Utara (Pantura) antara lain: Kabupaten Demak; Kabupaten Pati; dan Kabupaten Pekalongan.

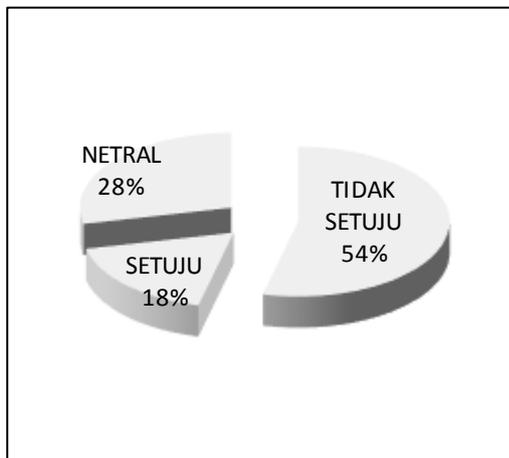
Resistensi gender sebagaimana dimaksud adalah tingkat penolakan masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan. Berikut ini satu persatu kasus resistensi gender yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada:

1. Pilkada Kabupaten Sukoharjo (2010)
Pelaksanaan pilkada Kabupa-ten Sukoharjo dilakukan pada tahun 2010 diikuti oleh Pasangan Mohammad Toha – Wahyudi (HADI), Titik Suprapti – Sutarto (TBR – TARTO); dan Wardoyo – Haryanto (WARTO).

Pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada Kamis, 3 Juni 2010 Pasangan WARTO unggul dengan perolehan suara sah sebesar 49,33%. WARTO didukung oleh koalisi tiga partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pasangan TBR – TARTO menempati urutan kedua dengan perolehan suara sah sebesar 29,23%. Hasil ini menyebabkan Titik Suprapti sebagai calon bupati perempuan gagal memenangi Pilkada untuk menjadi Bupati Sukoharjo 2010 – 2015.

Grafik-1: Resistensi Gender Pada Pilkada Sukoharjo, 2010



Sumber: data Primer, 2010

Kegagalan calon bupati perempuan pada Pilkada Sukoharjo 2010, tidak lepas dari adanya resistensi gender yang cukup besar. Grafik 1 menunjukkan tingkat resistensi gender sebesar 54%. Ketika survey dilakukan 54% responden menjawab tidak setuju terhadap calon bupati perempuan, dan hanya 18% saja yang menyatakan setuju, sedangkan yang netral 28%. Hal demikian mengindikasikan bahwa calon bupati perempuan di Kabupaten Sukoharjo menghadapi tingkat penolakan yang tinggi. Itulah salah satu sebab mengapa Titik Suprapti yang sejatinya adalah istri Bupati Sukoharjo *incumbent* gagal memenangi Pilkada.

2. Pilkada Kabupaten Sragen (2011)

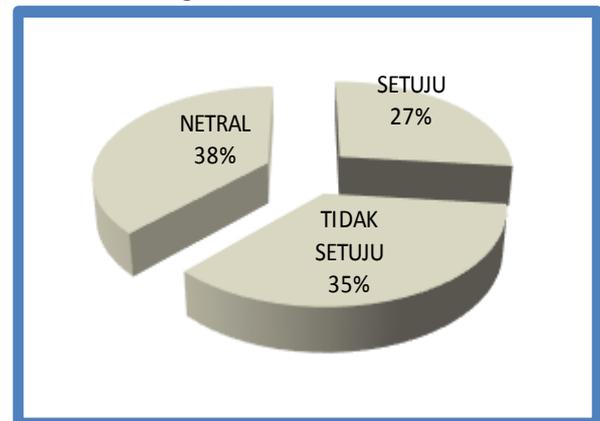
Pilkada Sragen menghadirkan salah satu calon bupati perempuan, yaitu Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Anak perempuan dari Bupati *incumbent* ketika itu, Untung Wiyono. Gagal menduduki

sang putrid mahkota menduduki singgasana Bupati Sragen (2011 – 2015).

Kusdinar Untung Yuni Sukowati maju dalam Pilkada Sragen 2011 berpasangan Darmawan, yang ketika itu masih menjabat sebagai sekretaris daerah. Pasangan Yuni – Darmawan (YUDA) didukung oleh 54% kekuatan partai politik di DPRD Sragen. Koalisi dipimpin oleh pemenang Pemilu legislative 2009, yaitu PDI – Perjuangan.

Pasangan YUDA bersaing dengan empat pasangan lainnya, yaitu Wiyono – Daryanto (NOTO), Sularno – Kushadjono (LAKU), Danang W – Sumiwarno (DAMAR), dan Agus FR – Daryanto (ADA). Pilkada Sragen yang berlangsung pada 20 Maret 2011 itu pun dimenangkan oleh Pasangan ADA dengan perolehan suara sah sebesar 50,17%. Sedangkan YUDA diurutan ke-2 dengan perolehan suara sah 44,45%. Hasil ini menjadikan calon bupati perempuan gagal dalam pemilukada Sragen 2011.

Grafik- 2. Resistensi Gender Pada Pilkada Sragen, 2011



Sumber; Data Primer, 2011

Merujuk pada grafik-2, menunjukkan bahwa pada pilkada Sragen diwarnai oleh adanya resistensi calon bupati perempuan. Walaupun tidak setinggi angka resistensi di kabupaten Sukoharjo, prosentase resistensi gender di Kabupaten Sragen 35%, menghambat pasangan YUDA mengungguli ADA.

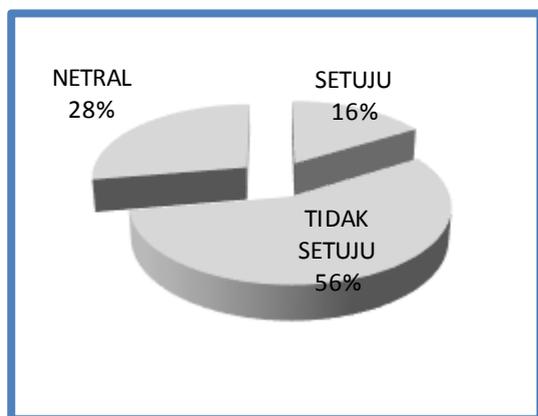
Kasus Pilkada Sragen 2011 yang gagal menempatkan calon bupati perempuan, merupakan fakta bahwa resistensi gender tersebut memang betul adanya.

3. Pilkada Kabupaten Klaten (2010)

Studi kasus tentang resistensi gender yang dilakukan Pilkada Klaten adalah kasus pilkada yang melibatkan calon perempuan berhasil atau menang. Namun

demikian bila diperhatikan posisi calon perempuan dalam Pilkada Klaten 2011 tidak pada posisi calon bupati tetapi sebagai calon Wakil Bupati. Hartini sebagai salahsatu peserta hajatan pemilihan kepala daeran berpasangan dengan Sunarna sang bupati *incumbent*. Sebagaimana banyak pendapat ahli umumnya pasangan calon bupati – wakil bupati *incumbent* memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangi pilkada. Dengan demikian rasanya tidak terlalu tepat untuk menjadikan *case* Pilkada Klaten 2011 untuk membantah adanya peluang calon kepala daerah perempuan memenangkan kontestasi politik Pilkada.

Grafik – 3. Resistensi Gender Pada Pilkada Klaten, 2011



Sumber: Data Primer, 2011

Grafik – 3 merupakan distribusi jawaban atas pertanyaan: “*apakah anda setuju atau tidak setuju terhadap calon bupati – wakil bupati perempuan pada Pilkada Klaten?*”. Atas pertanyaan tersebut sebanyak 56% mengatakan tidak setuju, 16% setuju, dan jawaban Netral 28%. Survey ini memaknai adanya resistensi gender yang tinggi pada Pilkada Klaten 2011. Angka resistensi gender Pilkada Klaten 2011 hampir sama besarnya dengan angka resistensi gender pada pilkada Sukoharjo (2010). Hal ini diduga karena letak wilayah berdekatan dengan culture masyarakat Sukoharjo dan Klaten yang relative sama.

4. Pilkada Kabupaten Demak (2011)

Pilkada Demak (2011) adalah salah satu *case study* kawasan Pantura Jawa Tengah, untuk melihat adanya resisten gender. Calon Bupati Perempuan adalah Sakidah Sakhwan berpasangan dengan Haryanto. Hasil Pilkada menempatkan Bupati *incumbent* Tafta Yani berpasangan

dengan Dachkirin menang telak pada perolehan suara sah sebesar 73,8%. Sedangkan pasangan Saidah – Haryanto berada diurutan kedua dengan perolehan suara sah sebesar 13,34%.

Hajatan Pilkada Kabupaten para wali ini diikuti oleh empat pasangan dengan perolehsah suara sah sebagai berikut: (1) Tafta – Dachirin (73,8%); (2) Saidah – Haryanto (13,34%); (3) Nadjib – Azzah (9,16%); dan (4) Maryono – Purnomo (3,7%).

Kekalahan calon bupati demak perempuan pada Pilkada Demak 2011, selain disebabkan oleh masih sangat kuatnya pasangan bupati *incumbent*, data survey menunjukkan adanya tingkat resistensi gender sebesar 17% (Grafik-4). Walaupun tidak sebesar angka resistensi gender di wilayah Eks- Karesidenan Surakarta, angka resistensi gender di kabupaten Demak ini menjadikan beban tambahan bagi calon bupati perempuan Sakidah Sakhwan mengurangi jeda yang terlalu lebar terhadap Tafta Yani.

Grafik – 4: Resistensi Gender Pada Pilkada Kabupaten Demak, 2011



Sumber, Data Primer, 2011

5. Pilkada Kabupaten Pati (2012)

Pilkada Pati (2012) berbeda dengan Pilkada Demak (2011). Pilkada Pati tidak melibatkan pasangan *incumbent*. Seluruh pasangan calon bupati – wakil bupati adalah tokoh politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Pati. Terdapat enam pasangan dengan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (PSU) sebagai berikut: (1) Slamet – Sri M (22,52%); (2) Imam S – Sujoko (34,7%); (3) Tomy – Karsidi (1,59%); (4) Sahid – Hasan (0,89%); (5) Haryanto – Budi (38,58%); (6) Kartina – Supano (1,58%).

Grafik – 5: Resistensi Gender Pada Pilkada Kabupaten Pati, 2012



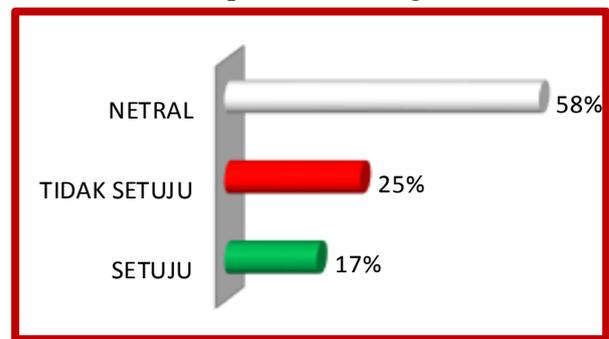
Sumber: Data Primer, 2012

Pilkada Pati (2012) melibatkan dua tokoh perempuan, yaitu calon bupati Kartina Sukowati dan calon wakil bupati Sri Mulyani. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang melibatkan tokoh perempuan pada Pilkada Pati gagal memenangi pilkada. Terlepas dari berbagai aspek pemenangan kontestasi politik, pilkada Pati mengindikasikan adanya resistensi gender. Grafik – 5 menunjukkan angka resistensi gender besar 25%. Artinya 25% responden survey menyatakan staus perempaun menyebabkan responden enggan memilihnya sebagai bupati atau wakil bupati Pati.

6. Pilkada Kabupaten Pekalongan (2011)

Ada yang unit dari *case study* Pilkada Kabupaten Pekalongan (2011) dibanding lokasi lain. Tokoh perempuan yang maju pada pilkada Pekalongan salah satunya adalah Bupati *Incumbent*, yaitu Bupati Siti Qomariah berpasangan dengan calon wakil bupati Riswandi Riswud. QORI demikian pasangan ini menyebut dirinya gagal memperoleh suara sah terbanyak dalam pengumungutan suara. QORI kalah dengan pasangan ANTONO – FADILA dengan cukup telak ANTONO – FADILA (56,78%) sementara QORI (36,5%). Fadila Arafik adalah seorang artis putrid dari Arafik pedangdut terkenal di era 80-an. Survey ini gagal memahami keterkaitan antara resistensi gender dengan hasil Pilkada Kabupaten Pekalongan. Namun begitu dari data survey yang disajikan Grafik – 6 memang menunjukkan adanya keengganan memilih calon bupati perempuan.

Grafik – 6: Resistensi Gender Pada Pilkada Kabupaten Pekalongan, 2011



Sumber: Data Primer, 2011

Tingkat resistensi gender pada Pilkada Kabupaten Pekalongan 2011, sama besar dengan yang ada di Kabupaten Pati, yaitu 25%.

Diantara enam Pilkada tidak ada satupun calon bupati perempuan yang menang dan kemudian menduduki jabatan Bupati. Namun demikian ada dua tokoh perempuan yang berhasil dalam pilkada tersebut, tetapi berada pada posisi wakil bupati, yaitu Wakil Bupati Pekalongan Fadilla Arafik, dan Wakil Bupati Klaten Hartini. Angka resistensi gender untuk masing – masing Pilkada. Secara umum dapat disampaikan bahwa Rata – rata angka resistensi gender di Pantura Jawa Tengah sebesar 22%, angka ini lebih rendah dibanding dengan angka rata – rata resistensi gender di Eks – Karesidenan Surakarta sebesar 33%.

Penutup

Ideologi gender terlebih dalam kehidupan politik local masih dominan. Berbagai kasus pilkada di Provinsi Jawa Tengah khususnya lakasi penelitian ini berlangsung mencatat lebih sedikit calon kepala daerah perempuan yang sukses memenangi pilkada dan menduduki jabatan Bupati atau wakil bupati kepala daerah.

Dari data hasil survey yang merekam persepsi public ada kecenderungan resisten terhadap calon bupati perempuan, walaupun besaran prosentasenya berbeda di setiap daerah kabupaten/kota. Daerah Pantura Jawa Tengah yang diwakili kasus pilkada Pati (2011), Pilkada Kabupaten Pekalongan (2011), dan Pilkada Kabupaten Demak

(2010) gagal menjadikan. Calon Bupati Kartina Sukowati (Pati) dengan tingkat resistensi gender 25%. Calon bupati Sakhidah Sakwan gagal menjadi bupati pada pilkada Kabupaten Demak dengan tingkat resistensi gender 17%. Calon Bupati Siti Khomariah (Kabupaten Pekalongan) gagal menjadi Bupati pekalongan dengan tingkat resistensi gender 25%. Rata – rata resistensi gender di Pantura Jawa Tengah serbesar 22%

Angka rata – rata resistensi gender di wilayah Eks- Karesidenan Surakarta (33%) cenderung lebih tinggi dibanding Pantura. Pilkada Sragen (2010) calon bupati Yuni Untung Sukowati gagal menjadi Bupati Sragen dengan tingkat resistensi gender 35%; Calon Bupati Titik Suprpti gagal menjadi Bupati Sukaharjo pada pilkada (2010) dengan tingkat resistensi gender 54%. Satu satunya pimpinan kepala daerah yang berhasil adalah Hartini pada posisi wakil bupati berpasangan dengan calon bupati Sunarna pada Pilkada Klaten 2010. Namun demikian data survey yang dilakukan ketika itu, tingkat resistensi gender tertinggi dibanding kabupaten lain. Di kabupaten klaten angka resistensi gender mencapai 56%.

Kesimpulan utama *case studi* ini adalah calon kepala daerah perempuan memiliki hambatan tambahan dalam memenangi pilkada, yaitu resistensi gender.

Daftar Pustaka

Butler, Judith. 1999. *Gender Trouble*. Routledge. London and New York

Eriyanto, 1999, *Metodologi Polling, Memberdayakan Suara Rakyat*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Fuchs, Gesine dan Beate Hoeker (2004), "Without Women merely a Half-Democracy", *International Policy Analysis Unit*,

Friedrich Ebert Stiftung Pitkin, Hanna (1967), *The Concept of Representation*. Berkeley: University Berkeley Press,

Goodman, Lizbeth. 1996. "Introduction: Gender as an approach to literature" dalam L. Goodman (ed.). *Literature and Gender*. Routledge.

Haryatmoko. 2003. "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoretis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu". dalam *Basis* (Edisi Khusus Pierre Bourdieu). Tahun ke-52, November-Desember 2003.

Imam Subono (2012) *Menuju Representasi Politik Perempuan yang lebih Bermakna*; FES, 2012.

Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. (terjemahan Nurhadi dari Pierre Bourdieu, 1992). Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Lister, R. (1997), *Citizenship: Feminist Perspective*. Basingstoke:

Melanie Mörmel, Erwin Schweisshelm, (2009) *FES Indonesia*, Juni 2009

MacMillan Lovenduski, Joni (2001), "Women and Politics: Minority representation or critical mass?". *Parliamentary Affairs* 54 (4).

Norris, P (1996), "Women politicians: transforming Westminster?", dalam J. Lovenduski and P. Norris (eds), *Women in Politics*. Oxford University Press.

Pergamon, Oxford Thomas, S. (1994), *How Women Legislate*. Oxford University Press.

Rahayu, Lina Meilinawati, dkk (2010), *Gender, Kekuasaan, dan Resistensi pada Masyarakat Adat Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat*

- (Laporan akhir penelitian), LP2M Universitas Padjajaran Bandung.
- Scout, Joan W. 1986. "Gender as a Useful Category of Historical Analysis". Dalam *American Historical Review* 91.5. 1986
- Squires, Judith (1999), *Gender in Political Theory*. Cambridge: Politiy Skard, T
- dan Haavio-Mannila (1985), "Women in Parliament", dalam E. Haavio-Mannila et all (eds), *Unfinished Democracy: Women in Nordic Politics*.
- Thomas, S dan S Welch, (1991), "The Impact of Gender on the Activities and Priorities of State Legislatures", *Western Political Quarterly*, 44, 2.